

STRUKTUR KETIMPANGAN EKONOMI DALAM INTEGRASI PASAR PADA KOMUNITAS DANAU SENTANI: SUATU TINJAUAN LITERATUR (2000–2025)

**M. Nur Wahyudin S¹, Brayon Virgil Lekitoo², Arnawan Arif³,
Mustakim⁴, Andi Hikmawati Yunus⁵**

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Email Korespondensi: nurwahyudin019@gmail.com

ABSTRACT

Transformation of the economy in Jayapura City and the Sentani Lake area shows a widening disparity between Indigenous Papuans (OAP) and Migrant Groups. This research presents a critical synthesis based on literature studies selected through screening for relevance to the theme, likely the Political Economy of Papua, Market Integration and Economic Inequality, and prioritized from publications from 2000–2025 to capture contemporary changes, although classical literature is also included. The analysis shows that in the last two decades, neutrality has been compromised through power structures that control land, capital, and economic opportunities, causing the Sentani Lake community to experience dispossession and marginalization. Household income inequality of OAP is caused by power relations and capital expansion. This article highlights the research gap and provides policy recommendations to improve market access and reduce economic marginalization of urban OAP.

Keywords: Political Economy Papua, Lake Sentani, Economic Inequality.

ABSTRAK

Transformasi ekonomi Kota Jayapura dan wilayah Danau Sentani memperlihatkan ketimpangan yang semakin melebar antara Orang Asli Papua (OAP) dan Kelompok Pendatang. Penelitian ini menyajikan sintesis kritis berbasis studi literatur yang dipilih melalui penyaringan berdasarkan relevansi dengan tema, yaitu *political economy papua*, integrasi pasar dan ketimpangan ekonomi, serta diprioritaskan dari publikasi tahun 2000–2025 untuk menangkap perubahan kontemporer yang terjadi, meskipun literatur klasik juga disertakan. Analisis menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, ketidaknetralan terjadi melalui struktur kekuasaan yang mengontrol tanah, modal, dan peluang ekonomi, menyebabkan komunitas Danau Sentani mengalami *dispossession* dan marginalisasi. Ketimpangan pendapatan rumah tangga OAP disebabkan oleh relasi kuasa dan ekspansi kapital. Artikel ini menyoroti research gap dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar serta mengurangi marginalisasi ekonomi OAP urban.

Kata kunci: *Political Economy Papua*, Danau Sentani, Ketimpangan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi mencerminkan perbedaan pendapatan dan struktur peluang dalam masyarakat. Menurut Birdsall (2007), ketimpangan bersifat struktural, dipengaruhi oleh posisi rumah tangga dalam akses modal, pendidikan, dan jaringan ekonomi. Dalam konteks ekonomi pembangunan, ketimpangan menentukan siapa yang dapat memanfaatkan dinamika pasar. Proses integrasi pasar, melalui peningkatan konektivitas dan arus barang, dapat menciptakan peluang baru tetapi juga mempertegas jarak antara kelompok dengan akses lebih baik dan yang terbatas. Barrett (2008) menyatakan bahwa dampak integrasi pasar tergantung pada kesiapan rumah tangga. Memahami struktur ketimpangan ekonomi adalah langkah awal untuk menilai dampak integrasi pasar pada masyarakat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

546

Indexed



SINTA 5



Di komunitas Danau Sentani, Jayapura, ketimpangan ekonomi semakin terlihat akibat integrasi pasar dalam dua dekade terakhir. Jaringan perdagangan yang berkembang mengubah pola produksi dan distribusi pendapatan. Rumah tangga dengan akses perahu bermotor dan modal usaha dapat memanfaatkan peluang pasar, sementara yang bergantung pada alat tradisional cenderung tertinggal. Hal ini sesuai dengan temuan Barrett (2008) bahwa keterhubungan pasar tidak menjamin pemerataan. Sejak 2000-an, Jayapura dan Danau Sentani mengalami urbanisasi, ekspansi kapital, dan perubahan struktur sosial-ekonomi rumah tangga OAP, menunjukkan ketidakseimbangan akses pasar dan sumber daya.

Beberapa penelitian yang cukup relevan juga mengungkap bahwa integrasi ekonomi pasar di Papua justru memperbesar jarak ekonomi antara OAP dan pendatang (Timmer, 2021; Widjojo et al., 2010). Sektor perdagangan, jasa transportasi, konstruksi, dan ekonomi informal kota secara dominan dikuasai kelompok non-Papua, sementara OAP lebih terarah pada pekerjaan berpendapatan rendah dan tidak stabil. Ketimpangan pendapatan rumah tangga ini bukan fenomena individual, melainkan cerminan struktur ketimpangan yang bersumber dari kolonialisme internal, dispossession tanah ulayat, dan peran negara dalam mengatur alur modal (Harvey, 2005; Anderson, 2004). serta beberapa literatur lainnya, seperti Kirsch (2007); Braithwaite et al. (2010); Harvey (2005); Munro (2018); dan ICRAF (2019). Beberapa literatur ini menjelaskan mengapa integrasi pasar di wilayah ini tidak berdampak merata bagi rumah tangga OAP.

Namun, meskipun isu ketimpangan ekonomi Papua banyak disinggung dalam kajian politik dan humaniora, masih sedikit penelitian yang mengkaji struktur ketimpangan ekonomi OAP melalui analisis ekonomi rumah tangga berbasis *political economy*. Sebagian besar studi masih bersifat kultural-deskriptif, dan belum menjelaskan hubungan antara integrasi pasar, relasi kuasa, akses modal, dan pendapatan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan tentang kebijakan sosial dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat adat Papua. Sumber data primer diambil dari database seperti JSTOR dan Google Scholar dengan kata kunci relevan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema integrasi pasar dan ketimpangan ekonomi, terutama publikasi dari 2000–2025, meskipun literatur klasik juga diperhitungkan.

Data dianalisis dengan sintesis tematik menggunakan kerangka political economy untuk menilai pengaruh struktur ekonomi-politik terhadap akses sumber daya dan posisi ekonomi rumah tangga OAP. Artikel ini bertujuan mengisi gap pengetahuan melalui sintesis kritis literatur dan mengeksplorasi hubungan antara integrasi pasar dan relasi kuasa dalam konteks ketimpangan di komunitas Danau Sentani.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan tentang kebijakan sosial dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat adat Papua. Sumber data primer diambil dari database seperti JSTOR dan Google Scholar dengan kata kunci relevan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema integrasi pasar dan ketimpangan ekonomi, terutama publikasi dari 2000–2025, meskipun literatur klasik juga diperhitungkan.

Data dianalisis dengan sintesis tematik menggunakan kerangka political economy untuk menilai pengaruh struktur ekonomi-politik terhadap akses sumber daya dan posisi ekonomi rumah tangga OAP. Artikel ini bertujuan mengisi gap pengetahuan melalui sintesis kritis literatur dan mengeksplorasi hubungan antara integrasi pasar dan relasi kuasa dalam konteks ketimpangan di komunitas Danau Sentani.

PEMBAHASAN

Transformasi Ekonomi Komunitas Danau Sentani

Literatur mengenai Papua mengungkapkan bahwa komunitas Danau Sentani mengalami perubahan sosial-ekonomi signifikan dalam dua dekade terakhir. Perubahan ini bukanlah alami, melainkan akibat dari pembangunan, integrasi pasar, dan perubahan relasi kuasa antara negara, masyarakat adat, dan aktor kapital. Sebelumnya, rumah tangga di sekitar Danau Sentani hidup dalam ekonomi subsistensi yang bergantung pada sumber daya danau, pertanian kecil, dan jaringan sosial marga. Kamma (1972) menggambarkan sistem tradisional ini sebagai hubungan antar-marga yang stabil berdasarkan adat, simbol, ritual, dan pertukaran sosial. Sejak 1990-an, terutama setelah tahun 2000, Danau Sentani mulai terhubung dengan Kota Jayapura dan pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura melalui pembangunan infrastruktur dan pemukiman baru. Hal ini mengubah orientasi ekonomi rumah tangga OAP, melemahkan aktivitas subsistensi seperti memancing dan berkebun, akibat tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang mengurangi ruang dan kualitas lingkungan.

Timmer (2021) mencatat bahwa urbanisasi di Jayapura menciptakan pola baru ekonomi rumah tangga Papua, yaitu pergeseran ke sektor jasa informal sebagai respons terhadap hilangnya basis subsistensi. Perubahan ini bukan hanya perubahan jenis pekerjaan, tetapi juga perubahan struktur ketergantungan: rumah tangga yang sebelumnya relatif mandiri kini bergantung pada pasar untuk kebutuhan dasar, mulai dari pangan hingga energi. Transformasi ini membuat rumah tangga OAP semakin rentan terhadap fluktuasi harga, kondisi pasar tenaga kerja, dan dinamika konsumsi perkotaan.

Salah satu aspek penting dari transformasi di wilayah Sentani adalah hilangnya tanah adat, yang berdampak pada ekonomi dan identitas masyarakat. Tanah yang sebelumnya digunakan untuk kebun dan lahan lain berkurang karena pembangunan perumahan dan infrastruktur, mengalihkan rumah tangga OAP ke sektor ekonomi yang lebih kompetitif namun tidak seimbang. Banyak yang beralih ke usaha kecil, tetapi menghadapi hambatan struktural dan dominasi pendatang, menciptakan "*urban indigenous underclass*".

Transformasi ekonomi ini menunjukkan bahwa perubahan ke ekonomi pasar tidak netral, melainkan terjadi dalam konteks ketimpangan kekuasaan antara negara, modal pendatang, dan masyarakat adat. Hilangnya tanah adalah bagian dari mekanisme "*accumulation by dispossession*", memindahkan sumber daya dari OAP ke aktor yang lebih berkuasa. Akibatnya, OAP terpaksa berpartisipasi dalam struktur ekonomi yang tidak mereka mampu kendalikan.

Analisis ini menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang muncul bukanlah persoalan kegagalan adaptasi oleh OAP, melainkan hasil langsung dari struktur institusi dan politik ekonomi yang mengatur alokasi ruang, modal, dan kesempatan. Struktur yang terbentuk dari proses pembangunan; mulai dari tata ruang, akses kredit, hingga jaringan distribusi yang sengaja didesain untuk memfasilitasi aliran modal ke aktor tertentu saja, sementara masyarakat adat hanya mendapatkan sisa dari dinamika pasar.

Akses Pasar dan Modal

Akses terhadap pasar dan modal merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam memahami dinamika ketimpangan ekonomi di komunitas Danau Sentani. Literatur menunjukkan bahwa rumah tangga orang asli Papua (OAP) memasuki pasar dalam posisi yang tidak setara, baik dari segi modal finansial, modal sosial, maupun literasi ekonomi. Bourdieu (1986) menekankan bahwa ketimpangan tidak hanya diproduksi oleh perbedaan modal ekonomi, tetapi juga oleh distribusi modal sosial dan budaya. Dalam konteks Sentani, perbedaan ini menjadi sangat mencolok ketika struktur pasar perkotaan Jayapura berkembang pesat dan semakin didominasi oleh jaringan pendatang yang sudah menguasai rantai distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja.

Modal finansial menjadi hambatan utama bagi rumah tangga OAP dalam mengakses lembaga keuangan formal akibat masalah administrasi, kurangnya agunan, dan rendahnya literasi finansial. Banyak yang kehilangan tanah ulayat tanpa kompensasi memadai, dan yang menerima kompensasi kesulitan mempertahankan nilai ekonominya. Ketergantungan pada konsumsi pasar urban

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

548

Indexed



SINTA 5



memperburuk situasi. Modal sosial dan jaringan ekonomi juga membatasi akses pasar OAP, dengan pendatang yang menguasai sektor perdagangan dan membangun jaringan informal yang kuat.

.De Haan & Zoomers (2005) menunjukkan bahwa akses terhadap peluang ekonomi sering kali lebih ditentukan oleh jaringan daripada kemampuan individu. Dalam konteks Jayapura-Sentani, jaringan sosial pendatang berfungsi sebagai mekanisme eksklusi yang tidak selalu bersifat formal, namun efektif dalam menentukan siapa yang dapat masuk dan berkembang dalam suatu sektor usaha. Rumah tangga OAP yang tidak memiliki jaringan serupa cenderung hanya mampu mengakses pekerjaan berpendapatan rendah, dengan peluang naik kelas ekonomi yang sangat terbatas.

Di Jayapura, transisi dari ekonomi subsistensi ke ekonomi pasar terhambat oleh rendahnya modal budaya untuk mengelola usaha dan bernegosiasi. Banyak rumah tangga OAP kurang mendapatkan pendidikan ekonomi atau pelatihan usaha yang memadai, sehingga mereka rentan mengalami kerugian di pasar. Kebijakan pemerintah lebih menguntungkan aktor dengan modal besar, membuat rumah tangga OAP sulit bersaing dan menghadapi hambatan regulatif. Ini memperkuat kerentanan ekonomi mereka.

Analisis akses pasar dan modal menunjukkan ketimpangan ekonomi di Danau Sentani disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang merugikan OAP. Rumah tangga OAP terjebak dalam ketidaksetaraan akibat perbedaan modal finansial, lemahnya jaringan sosial, dan kurangnya modal budaya yang sesuai dengan pasar modern. Dominasi kelompok bermodal mengurangi akses OAP ke peluang usaha, menciptakan pola ketidaksetaraan yang saling memperkuat antar generasi. Ketimpangan akses pasar adalah inti dari struktur ekonomi Jayapura-Sentani yang mendistribusikan sumber daya dan peluang secara tidak seimbang.

Relasi Kuasa: Negara, Elit, dan Kapital

Relasi kuasa merupakan dimensi fundamental yang membentuk pola distribusi ekonomi di kawasan Danau Sentani. Literatur *political economy* menegaskan bahwa pasar tidak bekerja dalam ruang yang bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap modal, tanah, perizinan, jaringan bisnis, dan peluang ekonomi. Dalam konteks Papua, relasi kuasa beroperasi melalui tiga poros utama: negara, elit lokal, dan aktor kapital pendatang. Interaksi ketiga poros ini menciptakan hierarki ekonomi yang menghasilkan ketimpangan struktural bagi rumah tangga orang asli Papua (OAP).

Pertama, peran negara menjadi sangat sentral dalam mengatur arah pembangunan dan alokasi sumber daya. Sejak awal 2000-an, kebijakan pembangunan di Jayapura-Sentani didorong oleh logika modernisasi yang menekankan percepatan infrastruktur, pembukaan kawasan permukiman, dan pengembangan pusat administrasi. Proyek-proyek negara seperti pelebaran jalan, pembangunan kantor pemerintahan, dan pengembangan fasilitas publik menyebabkan terjadinya konversi tanah adat dalam skala besar. Proses ini, meskipun sering dibingkai sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, pada praktiknya melibatkan ketidakseimbangan informasi, tekanan politik, dan skema kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi jangka panjang tanah tersebut. Munro (2018) menggambarkan bahwa hilangnya tanah ulayat di Sentani bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga proses politik yang melemahkan otonomi masyarakat adat dalam menentukan masa depan ekonomi mereka.

Kedua, para elit lokal baik pemimpin adat maupun pejabat politik Papua memiliki peran ambivalen dalam distribusi kekuasaan. Di satu sisi, elit adat berperan sebagai penjaga hak ulayat dan broker yang bernegosiasi dengan negara maupun investor. Namun di sisi lain, posisi mereka memungkinkan terjadinya konsentrasi keuntungan hanya pada segelintir kelompok. Literatur Papua Road Map (Widjojo et al., 2010) mencatat bahwa sebagian elite adat terlibat dalam praktik patronase yang membuat distribusi manfaat pembangunan tidak merata di antara anggota marga. Ketika kompensasi tanah, proyek pembangunan, atau peluang ekonomi hanya dinikmati oleh elite tertentu, ketimpangan internal antar-OAP semakin melebar. Dalam konteks Sentani, dinamika ini terlihat dari perbedaan drastis antara

keluarga pemilik tanah yang mendapatkan kompensasi besar dengan keluarga yang tidak memiliki hak ulayat formal atau tinggal di wilayah padat penduduk.

Ketiga, aktor kapital pendatang memainkan peran dominan dalam struktur ekonomi lokal. Mereka menguasai sektor perdagangan, logistik, transportasi, jasa konstruksi, dan bisnis skala menengah hingga besar. Dominasi ini tidak hanya berasal dari modal finansial, tetapi juga dari jaringan sosial dan bisnis yang telah mapan selama puluhan tahun. Jaringan ini berfungsi sebagai mekanisme informal yang menentukan aliran modal, akses barang, dan peluang usaha. Ketika negara membutuhkan kontraktor, pemasok, atau tenaga ahli untuk proyek pembangunan, aktor bermodal yang telah memiliki koneksi—bukan masyarakat adat biasa—yang mendapatkan akses tersebut. Hal ini menciptakan alur distribusi ekonomi yang secara sistematis meminggirkan rumah tangga OAP.

Relasi kuasa antar ketiga poros ini tidak bekerja secara terpisah; mereka saling memperkuat dan membentuk konfigurasi yang oleh literatur disebut sebagai “kolonialisme internal” (Anderson, 2004). Dalam kolonialisme internal, kelompok lokal kehilangan kendali atas sumber daya ekonominya karena kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh kelompok eksternal atau elite lokal yang terkooptasi. Di Danau Sentani, tanah adat dikonversi menjadi aset komersial, pasar dikuasai pedagang pendatang, dan OAP sering kali berada di posisi tawar yang lemah.

Relasi kuasa ini juga mempengaruhi representasi sosial, di mana OAP yang menolak pembangunan dianggap sebagai penghambat modernisasi, melemahkan posisi politik masyarakat adat. Hal ini menciptakan kondisi di mana kritik terhadap ketimpangan dapat dilegitimasi, menunjukkan bahwa relasi kuasa beroperasi melalui mekanisme ekonomi dan kontrol wacana publik.

Analisis relasi kuasa menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi di komunitas Danau Sentani tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik-ekonomi yang menempatkan OAP dalam struktur subordinat. Negara, elit lokal, dan aktor kapital pendatang membentuk jaringan kekuasaan yang mendistribusikan peluang ekonomi secara tidak merata. Ketika akses terhadap tanah, modal, dan pasar ditentukan oleh posisi dalam struktur kekuasaan, bukan oleh kapasitas atau kebutuhan rumah tangga, maka ketimpangan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Relasi kuasa ini menciptakan sistem ekonomi yang bersifat eksklusif bagi kelompok bermodal dan eksklusif bagi kelompok lokal, meskipun pembangunan terjadi di atas tanah adat mereka.

Dispossession Tanah Adat

Dispossession tanah adat merupakan salah satu isu paling mendasar dan menentukan dalam memahami ketimpangan ekonomi rumah tangga orang asli Papua (OAP) di kawasan Danau Sentani. Literatur mengenai Papua secara konsisten menunjukkan bahwa hilangnya tanah ulayat bukan hanya persoalan kehilangan aset material, tetapi juga kehilangan sumber identitas, legitimasi sosial, kapasitas ekonomi, dan mekanisme perlindungan sosial tradisional. Proses *dispossession* ini berlangsung melalui kombinasi kebijakan negara, tekanan pasar, relasi kuasa lokal, dan ekspansi modal pendatang yang secara bertahap mengubah ruang hidup masyarakat adat menjadi ruang komersial dalam ekonomi urban.

Historisnya, tanah di sekitar Danau Sentani merupakan basis utama sistem ekonomi masyarakat adat. Tanah digunakan untuk berkebun, membangun permukiman, menghasilkan pangan, dan menjaga hubungan sosial antar-marga. Hak kepemilikan bersifat kolektif, diwariskan melalui garis keturunan, dan dilindungi oleh aturan adat yang ketat. Namun, ketika pembangunan kota dan infrastruktur meningkat sejak awal 2000-an, tanah adat mulai dikonversi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah, pemukiman modern, fasilitas umum, dan area komersial. Proses ini sering kali berlangsung tanpa konsultasi bermakna, minim transparansi, dan tidak mempertimbangkan nilai sosial atau ekonomi jangka panjang tanah adat tersebut.

ICRAF (2019) dan Munro (2018) mencatat bahwa kompensasi tanah yang diberikan kepada masyarakat adat seringkali jauh lebih kecil dari nilai ekonominya setelah dikonversi menjadi aset komersial. Tanah yang sebelumnya memiliki fungsi multifungsi seperti: ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian direduksi menjadi sekadar objek transaksi, padahal nilai tanah adat bagi masyarakat Sentani

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

550

Indexed

SINTA 5



jauh melampaui nilai jual ekonomi. Proses konversi ini menciptakan situasi di mana rumah tangga OAP kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi fondasi kemandirian mereka.

Dispossession tanah sering terjadi melalui mekanisme halus, seperti tekanan ekonomi urban dan legalisasi tanah yang tidak mengakui klaim adat. Masyarakat adat mungkin menerima kompensasi simbolik saat tanah ulayat dijadikan kawasan perumahan, namun kehilangan hak pengelolaan. Hal ini juga menciptakan ketimpangan antar-OAP, di mana elit adat menjadi penerima utama kompensasi, menyebabkan stratifikasi ekonomi. Selain kehilangan aset, *dispossession* menghilangkan mekanisme perlindungan sosial berbasis komunitas, melemahkan solidaritas, dan meningkatkan ketergantungan pada pekerjaan informal dan konsumerisme, yang tidak stabil. Widjojo et al. (2010) mencatat bahwa ketimpangan internal ini diperparah oleh runtuhnya mekanisme kolektif distribusi kekayaan adat akibat tekanan ekonomi pasar yang semakin kuat.

Analisis terhadap *dispossession* tanah adat menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Sentani berasal dari hilangnya sumber daya struktural, bukan dari rendahnya kemampuan usaha rumah tangga OAP. Tanah adalah fondasi sosial, budaya, dan politik masyarakat adat. Ketika tanah diambil alih oleh negara atau pasar, struktur kehidupan masyarakat runtuh. Proses ini memaksa OAP memasuki pasar dalam posisi lemah, tanpa aset warisan atau jaring pengaman sosial. *Dispossession* menciptakan ketimpangan struktural dan permanen, di mana elit adat mungkin mendapatkan keuntungan sementara, tetapi mayoritas OAP kehilangan kestabilan ekonomi yang penting. Ketika tanah menjadi komoditas, masyarakat adat kehilangan kendali atas ruang hidup dan masa depannya.

Manifestasi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di kawasan Danau Sentani merupakan hasil yang tampak (*visible outcome*) dari proses-proses struktural yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya: transformasi ekonomi, keterbatasan akses pasar dan modal, relasi kuasa yang timpang, serta *dispossession* tanah adat. Literatur menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan orang asli Papua (OAP) di Jayapura dan Sentani bukan hanya mencerminkan perbedaan tingkat kerja keras atau kemampuan individu, tetapi merupakan refleksi dari perbedaan berbasis struktur yang menentukan posisi mereka dalam sistem ekonomi urban.

Data BPS Papua (2020–2024) menunjukkan bahwa rumah tangga OAP cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan berpendapatan rendah, seperti buruh harian, jasa transportasi informal, pekerja bangunan, pedagang kecil, dan pekerjaan serabutan lainnya. Sektor-sektor ini umumnya tidak memberikan kestabilan pendapatan, tidak memiliki perlindungan kerja, dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Sebaliknya, sektor-sektor ekonomi yang memiliki margin keuntungan tinggi—perdagangan besar, kontraktor, distribusi logistik, industri jasa modern, dan usaha retail menengah—lebih banyak dikuasai oleh kelompok pendatang yang memiliki modal finansial, jaringan bisnis, dan pengalaman yang lebih panjang dalam ekonomi pasar.

Perbedaan ini menunjukkan adanya pembagian kerja (*division of labor*) yang bersifat etno-ekonomi. OAP mengisi sektor informal berupa rendah, sementara pendatang menguasai sektor formal dan semi-formal yang lebih menguntungkan. Ketimpangan struktur ini diperkuat oleh jaringan sosial yang saling mendukung di antara kelompok pendatang, termasuk sistem patronase, kemudahan akses barang, dan kemampuan membangun relasi bisnis lintas wilayah. Rigg (2007) menyebut fenomena ini sebagai “*livelihood stratification*”, di mana kelompok tertentu secara sistematis ditempatkan dalam posisi rentan dalam ekonomi pasar.

Ketimpangan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi dan kerentanan ekonomi rumah tangga OAP. Dengan pendapatan rendah, mereka menghabiskan sebagian besar uang untuk kebutuhan dasar tanpa bisa menabung atau berinvestasi, menciptakan siklus ketergantungan pada pekerjaan informal yang tidak stabil. Ketika terjadi kejutan ekonomi, mereka lebih cepat terdampak dibandingkan pendatang yang memiliki cadangan modal. Secara sosial, OAP yang kehilangan tanah dan tinggal di perkotaan menghadapi biaya hidup yang meningkat, terutama untuk perumahan dan konsumsi harian.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

551

Indexed



SINTA 5



Perpindahan dari sistem subsistensi ke konsumsi komersial meningkatkan biaya hidup sementara pendapatan tetap rendah, menciptakan *urban vulnerability trap*.

Ketimpangan pendapatan juga menimbulkan konsekuensi antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas, teknologi, dan mobilitas sosial. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan ketimpangan sosial semakin mengakar dan sulit diperbaiki melalui mekanisme pasar. Ketika satu generasi tidak berhasil mengakumulasi modal ekonomi, generasi berikutnya memulai kehidupan dari titik yang sama atau bahkan lebih rendah akibat tekanan urbanisasi. Ketimpangan antar generasi ini menjadi salah satu penanda ketidaksetaraan struktural yang paling berat diatasi dalam konteks masyarakat adat Papua.

Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mencerminkan struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak seimbang. Di Danau Sentani, ketimpangan ini dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, kebijakan pembangunan yang eksklusif, dan dominasi ekonomi oleh kelompok pendatang serta elite lokal. Ketidaksetaraan ekonomi OAP tidak dapat dijelaskan oleh model pembangunan konvensional, melainkan merupakan hasil dari proses dispossession, marginalisasi, dan relasi kuasa yang memfokuskan peluang pada kelompok kaya. Rumah tangga OAP beroperasi dalam batasan struktur historis dan sosial yang menempatkan mereka di posisi bawah dalam hierarki ekonomi, menjadikan ketimpangan pendapatan sebagai indikator ketidakadilan struktural yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi rumah tangga orang asli Papua (OAP) di Danau Sentani tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan ekonomi mikro. Ketimpangan ini bersifat struktural, terkait ekspansi kapitalisme, dan integrasi pasar yang tidak seimbang. Akses terhadap tanah, modal, dan peluang ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pendatang dan elite lokal, sehingga mengurangi kapasitas ekonomi OAP. Pasar di Papua tidak netral, lebih menguntungkan kelompok pendatang. Sementara itu, OAP terjebak di sektor informal yang tidak stabil dan kurang produktif. Ketimpangan ini bukan karena “ketertinggalan budaya”, melainkan akibat distribusi kuasa yang tidak merata. Kesenjangan pendapatan di kalangan OAP mencerminkan relasi kuasa dan kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Tanpa perubahan struktural, ketimpangan ekonomi di Danau Sentani bisa menjadi kondisi permanen. Sebagaimana dijelaskan Harvey (2005)—menjadi pola dominan yang menjelaskan hilangnya tanah ulayat, pergeseran ruang hidup, dan pengurangan kapasitas ekonomi OAP dalam konteks urban Jayapura–Sentani.

REFERENSI

- Anderson, B. (2004). *Internal colonialism in Eastern Indonesia*. In H. Antlöv & S. Cederroth (Eds.), *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to Indigenism*. Routledge.
- Barrett, C. B. (2008). *Smallholder market participation: Concepts and evidence from eastern and southern Africa*. Food Policy, 33(4).
- Birdsall, N. (2007). *Income distribution: Effects on growth and development*. Center for Global Development.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- BPS Papua. (2020–2024). *Statistik Provinsi Papua dan Kota Jayapura*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Braithwaite, J., Duncan, B., & Clifford, G. (2010). *Anomie and inequality in Papua*. ANU Press.
- de Haan, L., & Zoomers, A. (2005). Exploring the frontier of livelihoods research. *Development and Change*, 36(1).
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

552

Indexed



SINTA 5



- Harvey, D. (2005). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- ICRAF & Yayasan Bina Adat Papua. (2019). *Laporan tanah adat dan perubahan penggunaan lahan Papua*. World Agroforestry (ICRAF).
- Kamma, F. C. (1972). *Ethnohistory of Lake Sentani*. Martinus Nijhoff.
- Kanbur, R., & Lustig, N. (2019). *Why inequality matters and what can be done about it*. In *Global Perspectives on Income Inequality*.
- Kirsch, S. (2007). *Indigenous movements and the risks of resource capitalism*. *American Anthropologist*, 109(3).
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Munro, J. (2018). *Dispossession and development in Papua*. ANU Press.
- North, D. C. (1991). *Institutions*. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1).
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Rigg, J. (2007). *An everyday geography of the global south*. Routledge.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. IDS Working Paper, 72. Institute of Development Studies.
- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stasch, R. (2013). *Political relations in Papua*. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 14(5).
- Timmer, J. (2021). *Urbanization and marginalisation among Papuans*. *Oceania*, 91(1).
- Widjojo, M., et al. (2010). *Papua Road Map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. LIPI Press.